

**ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SITUBONDO**

***POLICY ANALYSIS AND STRATEGY OF TRADITIONAL MARKET
DEVELOPMENT IN SITUBONDO***

Dini Noor Aini¹⁾ Hasan Muchtar Fauzi^{2)*}

Email:Hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Kebijakan otonomi telah mengarahkan kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan potensi di sektor perdagangan dan jasa. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan adalah meningkatkan aktivitas pasar tradisional. Program khusus untuk pengembangan pasar tradisional, yaitu revitalisasi pasar tradisional Pasar Panji, Pasar Ardirejo, Pasar Panarukan dan Pasar Sumberkolak, tetapi program itu hanya menimbulkan kontroversi dengan para pebalap yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tempat penjualan. Penelitian ini menggunakan tiga analisis. Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk menentukan tingkat keterlibatan, minat, dan pengaruh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui penyebab kegagalan kebijakan, apakah proses persiapannya tidak tepat atau implementasinya tidak berjalan dengan baik. Analisis PHA digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan hak pasar tradisional di Kabupaten Situbondo sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Strategi Pengembangan Pasar, Analisis Kebijakan

ABSTRACT

The autonomy policy has directed the development policy of Situbondo to improve the living standard of the community with its potentials in trade and services sector. The policy made by the government to increase the trade sector contribution is to increase the activities of traditional markets. Special programs were made for the development of traditional markets to revitalize some traditional markets such as Panji Market, Ardirejo Market, Panarukan Market and Sumberkolak Market, but the programs only caused a controversy with the traders because of the needs of the place of selling problem. This study uses three analyzes. Stakeholder analysis is conducted to determine the level of involvement, interests and influence of all stakeholders involved in traditional market development policies. Descriptive analysis is used to determine the cause of the failure of the policy, whether the process of the preparation is not appropriate or its implementation is not running properly. PHA analysis is used to formulate the strategy of development of traditional market right in Situbondo Regency so that can become input for Local Government.

Keywords: Market Development Strategy, Policy Analysis

PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan perekonomian di Indonesia bisa ditandai oleh maraknya pembangunan pusat perdagangan. Bentuk fisik pusat perdagangan bisa dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan swalayan modern. Perbedaan yang mencolok antara pasar tradisional dengan pasar modern adalah dari sarana-prasarananya. dan akhirnya berujung pada tingkat pelayanan. Keterbatasan sarana prasarana yang ada di pasar tradisional berdampak pula pada tingkat kepuasan konsumen menjadi rendah. Bagi konsumen tentu akan memilih *alternatif* lain yang lebih memuaskan dalam kenyamanan berbelanja seperti pasar modern. Pesatnya pertumbuhan pasar moderen membuat kota-kota besar dan sedang di Indonesia makin bersinar gemerlap. Akan tetapi kompetisi yang tidak berimbang serta kesuksesan *ekspansi* pasar modern di berbagai tempat, tidak menutup kemungkinan jumlah pasar tradisional yang gulung tikar akan terus bertambah. Keberadaan pasar tradisional terancam karena semakin menjamurnya swalayan dengan sistem *waralabanya* yang mampu *mempenetrasikonsumen* ke pelosok Desa.

Dari data statistik yang dipublikasikan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengungkapkan keluhan dari para pedagang bahwa, sepanjang tahun 2005 *omset* penjualan para pedagang pasar tradisional turun 30% persen sampai 40% persen akibat terlalu *ekspansifnya* pengembangan pasar modern terutama *hiper market, mini market* seperti *Indomart* dan *Alramart*. Sudah banyak Kios pasar tradisional yang harus tutup, karena sulit bersaing dengan pasar modern. Data dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), menegaskan bahwa pada tahun 2005 seperti dikutip *website* Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa, sekitar 400 toko di pasar tradisional tutup usaha setiap tahunnya. (Indrakh, 2007:3). Menurut riset AC Nielsen pada tahun 2006 menunjukkan bahwa pangsa pasar modern meningkat 11.8% selama lima tahun terakhir. Jika pangsa pasar dari pasar modern pada tahun 2001 adalah 24.8% maka pangsa pasar tersebut menjadi 32.4% tahun 2005. Hal ini berarti bahwa dalam periode 2001/2006, sebanyak 11.8% konsumen ritel Indonesia telah

meninggalkan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern. Napitupulu (dalam Pilyang, 2010:20)

Perkembangan otonomi daerah telah membawa sejumlah implikasi terhadap perubahan fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan, baik dalam kelembagaan, pemanfaatan dan penggalian sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Pemerintah daerah harus dapat menggali seluruh potensi yang ada di dalam pengelolaan keuangan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan daerah dapat berkembang secara mandiri.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa adalah melalui peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian yang ada di Kabupaten Situbondo. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Situbondo yaitu dengan meningkatkan aktivitas pasar-pasar tradisional sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat. Pengembangan pasar-pasar tradisional diarahkan pada penyediaan lahan, pembangunan dan pemanfaatan pasar tradisional di setiap kecamatan sebagai sentra ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan program khusus bagi pengembangan pasar tradisional yaitu pengembangan pasar-pasar di setiap kecamatan. Implementasi dari program tersebut dibuat supaya kegiatan perdagangan regional di Kabupaten tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota namun juga di daerah pinggiran yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi, dan dengan pengembangan kegiatan perdagangan lokal di tiap kecamatan akan membantu tercapainya pemerataan kegiatan ekonomi di seluruh kecamatan.

Pada kenyataannya pelaksanaan program yang ditetapkan Pemda Kabupaten Situbondo tidak berjalan secara optimal. Kegagalan program tersebut di antaranya adalah protes pedagang pasar tradisional panarukan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang untuk berjualan, karena tempat atau kios yang digunakan dinilai lebih kecil dari sebelumnya, sehingga terasa sempit, yang semula paling kecil berukuran 3x3 menjadi 2,5x2 meter persegi. Hal tersebut juga

tidak sesuai dengan sosialisasi sebelumnya yang dijanjikan minimal 3x3 persegi. Ditambah lagi adanya pungutan liar dari oknum-oknum petugas pasar. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dari rencana dan implementasi kebijakan Pemda Kabupaten Situbondo untuk mengetahui penyebab kegagalan kebijakan tersebut. Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka untuk itu perlu diketahui:

1. Bagaimana kepentingan dan pengaruh dari *stakeholders* yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo?
2. Apa penyebab dari belum berhasilnya kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo? Apakah hal ini disebabkan oleh proses penyusunan program pengembangan pasar tradisional yang kurang tepat? Atau penerapannya yang tidak berjalan dengan baik?
3. Bagaimana rencana dan strategi pengembangan pasar tradisional yang tepat untuk Kabupaten Situbondo?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengambil kebijakan yang berasal dari Lembaga/Instansi Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Swasta dan para pedagang. Data primer mencakup:

1. Proses perencanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional,
2. Penerapan program, dan
3. Strategi pengembangan pasar tradisional.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data penunjang yang relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Situbondo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Pusat Statistik (BPS), Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Tradisional (UPTD). Data penunjang diperoleh dari laporan hasil penelitian terkait, jurnal, internet serta sumber-sumber lainnya.

Data yang dikumpulkan;

1. Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap keberhasilan program.
2. Rencana strategis, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana tata ruang wilayah, dan lain sebagainya.
3. Persepsi masyarakat tentang pengembangan pasar tradisional terdiri dari tujuan , aspek, kreteria dan alternatif strategi kebijakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembangunan Pasar Tradisional

Untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan untuk membangun pasar tradisional di beberapa kecamatan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana perekonomian sebagai salah satu wadah untuk menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi wilayah sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik serta terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan.

2. Program Pendukung Lainnya

Berbagai upaya lain yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pasar sebagai salah satu media bagi berlangsungnya kegiatan perdagangan di tingkat masyarakat antara lain:

- a) Memantau lalulintas barang dan jasa, untuk mengetahui tingkat perkembangan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat sebagai bahan penghitungan inflasi, serta sebagai upaya pengendalian stock barang.
- b) Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), bertujuan untuk meminimalisasi jumlah PKL yang terkonsentrasi di pusat kota sehingga dapat disebar ke berbagai wilayah Kabupaten Situbondo.
- c) Pengembangan sistem informasi dan pemasaran dengan tujuan untuk menciptakan informasi pasar, harga dan hasil produk serta mempromosikan produk dalam rangka perluasan pasar.

- d) Optimalisasi pemanfaatan kios dan los berupa anjuran kepada pemilik kios untuk segera menempati kios dan losnya, penertiban pemanfaatan kios serta peningkatan kemampuan SDM pengelola pasar melalui diklat atau pelatihan.

Analisis Stakeholders

Hasil analisis *stakeholders* yang dilakukan menunjukkan terdapat beberapa *stakeholders* yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo. Penggolongan *stakeholders* dibuat berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional. *Stakeholders* primer merupakan mereka yang dipengaruhi secara langsung, baik secara positif (penerima manfaat) atau negatif (terkena dampak negatif) akibat pengembangan pasar tradisional, yaitu kelompok pedagang, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan pihak pengelola pasar. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo dipengaruhi oleh tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholders*. Masing-masing *stakeholders* memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Intensitas pengaruh dan kepentingan *stakeholders* didasarkan pada bentuk interaksi, keuntungan dan dampak yang dihasilkan terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional serta posisi yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

Masyarakat sebagai sasaran program dalam hal ini khususnya pedagang memiliki kepentingan tertinggi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pengembangan pasar tradisional. Mereka memiliki kepentingan tertinggi karena pasar tradisional merupakan tempat mereka bekerja sehingga kebijakan pengembangan pasar tradisional akan mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Namun tingkat kekuatan pedagang dalam kebijakan ini rendah sehingga mereka tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan. Mereka hanya dilibatkan dalam proses perencanaan yaitu ketika Pasar akan dibangun melalui musyawarah antara kelompok pedagang dan pejabat pemerintah. Keluhan-keluhan pedagang selama ini disampaikan kepada pihak pengelola pasar, yang kemudian akan disampaikan oleh pihak pengelola pasar

kepada Disperindagkop.

Pihak pengelola pasar pemerintah (UPTD) memiliki kepentingan tinggi terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional. Hal ini didasarkan pada tugas pokok UPTD sebagai pengelola pasar pemerintah yang berkaitan langsung dengan pedagang yaitu melakukan pengelolaan pasar terutama dalam hal pendataan pedagang dan penarikan retribusi. UPTD tidak memiliki kekuatan untuk ikut mengambil keputusan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional karena secara struktural dan birokrasi UPTD berada di bawah Kepala Disperindagkop, sehingga kekuatan pengaruh UPTD dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional tergolong rendah yaitu terbatas pada usulan-usulan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban UPTD. Padahal pihak UPTD yang menerima keluhan langsung dari para pedagang.

Instansi lain yang ikut terlibat dalam kebijakan ini yaitu Dispenda, DLHK dan DTKP. Ketiga instansi ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi namun tingkat kepentingannya terhadap kebijakan rendah. Kepentingan rendah pada tiga *stakeholders* tersebut karena ketiga instansi ini tidak terlibat secara langsung dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Kepentingan mereka terhadap kebijakan ini hanya terbatas pada tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tugas untuk menjaga kebersihan lingkungan Kabupaten Situbondo, sehingga masalah sampah pasar menjadi tanggung jawab dari DLHK, sedangkan DTKP berfungsi sebagai pelaksana teknis yaitu pemegang proyek untuk pembangunan pasar tradisional, sehingga tugasnya terbatas pada pembangunan fisik pasar sesuai rencana yang telah ditentukan oleh Bapeda.

Dispenda memiliki kepentingan rendah karena hanya berkaitan dengan pembukuan dan laporan penerimaan retribusi pasar tradisional. Ketiga *stakeholders* tersebut memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional karena secara birokrasi dan struktural ketiga instansi tersebut memiliki posisi yang sama dengan Bapeda dan Disperindagkop. Pada pembahasan rencana kebijakan, mereka dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan fungsi masing-masing instansi yang dapat

mempengaruhi hasil perencanaan kebijakan. Pihak swasta sebagai pengelola pasar memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah karena kepentingan mereka hanya terbatas pada pasar yang mereka kelola saja, sehingga mereka tidak dilibatkan dalam proses kebijakan pengembangan pasar tradisional.

Tindakan yang perlu dilakukan bagi *stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi adalah pelibatan *stakeholders* dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Tindakan bagi *stakeholders* yang memiliki kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah adalah dilibatkan dalam hal penyaluran data dan informasi mengenai potensi pasar tradisional dan upaya pengembangannya. *Stakeholders* yang memiliki kepentingan rendah dengan pengaruh tinggi dapat dilibatkan untuk memberi pertimbangan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Sedangkan bagi *stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah maka tindakan yang perlu dilakukan cukup dengan melakukan pengawasan (monitor) tanpa perlu terlibat secara langsung dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional.

Stakeholders yang memiliki kepentingan yang tinggi, akan memiliki kekuatan yang tinggi pula dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Pada kenyataannya *stakeholders* yang memiliki kepentingan tinggi justru tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan pengembangan pasar tradisional. Pedagang dan pihak pengelola pasar yang memiliki kepentingan tinggi terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional tidak memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Akibatnya dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, pemerintah kurang mendapat informasi mengenai kondisi riil di lapangan karena tidak dilibatkannya pedagang, UPTD dan pengelola swasta. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan pun akhirnya menjadi tidak tepat karena lebih mementingkan kepentingan dari pemerintah saja tanpa mengakomodir kepentingan pedagang dan masyarakat. Masyarakat pedagang yang memiliki kepentingan tertinggi seharusnya memiliki tingkat pengaruh yang tinggi pula dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional.

Hal ini dikarenakan kebijakan pengembangan pasar tradisional disusun

untuk mengakomodir kepentingan pedagang sehingga dengan adanya kebijakan ini pedagang tidak akan merasa dirugikan. Selain itu, dengan dilibatkannya para pedagang dalam perencanaan kebijakan, maka dukungan terhadap kebijakan akan bertambah dalam artian tidak ada pedagang yang akan menolak kebijakan. Dengan demikian kemungkinan kebijakan ini untuk berhasil dilaksanakan akan semakin besar.

Pihak UPTD sebagai pengelola pasar pemerintah juga seharusnya memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional, karena pihak UPTD-lah yang benar-benar berhubungan dengan para pedagang dan konsumen di pasar sehingga mereka mengerti kondisi riil di lapangan. Keterlibatan UPTD dalam penyusunan kebijakan akan sangat berguna dalam perumusan kebijakan yang tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pihak swasta sebagai pengelola pasar juga seharusnya dilibatkan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Meskipun peran mereka hanya terbatas pada pasar yang mereka kelola saja, namun mereka memiliki potensi untuk berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional. Pihak swasta dapat mengelola pasar milik pemerintah secara profesional sehingga pasar tradisional dapat berkembang secara mandiri dan tidak tergantung pada anggaran pemerintah.

Keterlibatan masyarakat pedagang dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional ini yaitu dengan keterlibatan komunitas pedagang pasar melalui asosiasi pedagang untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengelola pasar, sehingga dengan dilibatkannya pedagang dalam mengelola pasar maka mereka juga akan ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar sehingga lebih bersih dan rapi. Selain itu, dengan dilibatkannya pedagang akan lebih menarik konsumen karena pedaganglah yang mengerti kondisi riil konsumennya.

Sebelum pemerintah melakukan suatu kebijakan pengembangan pasar tradisional maka seharusnya dilakukan studi kelayakan yang komprehensif terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Studi kelayakan yang dilakukan dapat berupa diskusi atau musyawarah dengan warga dan pedagang untuk mengetahui kondisi riil di lapangan melalui suatu forum

komunikasi. Diskusi ini dilakukan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kepentingan antara pemerintah, pengelola pasar dan pedagang sehingga pada akhirnya seluruh pihak dapat dipuaskan dengan adanya kebijakan. Adanya diskusi bukan hanya mengenai sosialisasi kebijakan kepada pedagang saja namun pemerintah juga harus mendengarkan keberatan-keberatan dari pihak pedagang dan mencari solusi bersama. Studi kelayakan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan.

Apabila kesepakatan telah tercapai maka seluruh pihak harus mau menaati kebijakan dan ditetapkan sanksi bagi yang melanggar kebijakan yang telah disepakati. Pedagang juga memiliki hak atas informasi apapun yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan pasar tradisional. Perlu dibentuk dinas atau lembaga yang menangani keluhan pedagang/masyarakat selama proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan. Dinas ini memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti keluhan pedagang. Pengelola pasar (UPTD) perlu diberikan pelatihan khusus agar dapat mengelola manajemen pasar secara lebih profesional.

Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional

Analisis kebijakan pengembangan pasar tradisional dilakukan untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan kebijakan di Kabupaten Situbondo. Penyebab kegagalan kebijakan dalam pengembangan pasar tradisional dapat dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan penerapan. Proses dalam perencanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional dapat mempengaruhi penerapan kebijakan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil kebijakan.

1. Analisis Proses

Analisis proses dimaksudkan untuk mengetahui tahapan-tahapan perencanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional serta keterlibatan *stakeholders*. Adanya penyimpangan dalam tahapan proses perencanaan dan perumusan kebijakan dapat memberikan petunjuk dalam menganalisis penyebab ketidakberhasilan kebijakan. Proses perencanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah dianalisis sesuai

dengan kriteria dan indikator yang telah ditentukan, kemudian baru dikaji mengenai penyebab ketidakberhasilan kebijakan. Apabila dalam penyusunan kebijakan itu sendiri kurang tepat maka akan berdampak pada implementasi kebijakan.

Keterlibatan *stakeholders*, yaitu melibatkan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan dalam proses perencanaan; pemahaman fungsi, wewenang dan tanggungjawab dari *stakeholders* yang terlibat; teridentifikasinya kepentingan setiap *stakeholders*; dan *stakeholders* yang terlibat memahami program dengan baik. Kriteria ini merupakan faktor utama yang menyebabkan kebijakan kurang berhasil mencapai tujuannya berdasarkan persepsi informan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator keterlibatan seluruh pihak dalam proses perencanaan kebijakan ini, ternyata tidak semua *stakeholders* yang terkait dengan kebijakan pengembangan pasar tradisional terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan kebijakan.

Proses perencanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional ini seharusnya melibatkan tiga *stakeholders* utama yaitu pemerintah daerah diwakili oleh Bapeda dan UPTD, pihak swasta dan pedagang. Hasil analisis *stakeholders* terlihat bahwa pedagang yang memiliki kepentingan tinggi tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan. Pada proses perencanaan kebijakan ini, Bapeda memiliki peran utama. Hal ini dikarenakan Bapeda yang merumuskan perencanaan dan menentukan lokasi tempat yang akan di revitalisasi serta menetapkan lokasi di setiap kecamatan di mana pasar tradisional akan dibangun, juga menilai apakah lokasi tersebut layak untuk dibangun.

2. Analisis Proses Perencanaan Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional.

Pada proses perencanaan kebijakan, dominasi paling tinggi terdapat pada pihak Bapeda. Pedagang hanya disosialisasikan mengenai rencana pemindahan pasar tetapi tidak ikut dilibatkan dalam proses penentuan tempat sebagai pasar pengganti. Adanya dominasi yang tinggi oleh Bapeda mengakibatkan proses perencanaan hanya didasarkan pada pandangan pihak Pemerintah dan kurang memahami kepentingan pedagang. Pada mulanya para pedagang setuju untuk dipindahkan. Akan tetapi setelah Pemerintah selesai membangun Pasar Panarukan

banyak pedagang yang menolak untuk pindah karena relokasinya tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Selain itu, penentuan tempat pemindahan dilakukan secara undian sehingga pedagang harus mau menempati kios baru di pasar yang sesuai dengan undian yang diambilnya. Oleh karena itu proses perencanaan kebijakan harus melihat pada; 1) partisipasi publik, 2) akuntabilitas, 3) responsivitas, transparansi, 4) ego sektoral, yaitu pembangunan pasar tradisional memperhatikan kepentingan sektor dan kawasan lain; dan kebijakan pengembangan pasar tradisional tidak menimbulkan konflik antar sektor atau antar kawasan maupun antara masyarakat dengan pemerintah, 5) Sosialisasi kebijakan

3. Analisis Penerapan Kebijakan

Penerapan perencanaan pengembangan pasar tradisional secara efektif dan efisien. yaitu program atau aktivitas telah dilaksanakan; program atau aktivitas dilaksanakan secara efektif dan efisien; sasaran atau hasil yang diinginkan telah tercapai; ketepatan alokasi sumberdana; konsistensi pelaksanaan program sesuai target operasional yang telah ditetapkan. Meskipun sebagian program atau kegiatan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional telah dilaksanakan namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan pengembangan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh pemerintah belum berhasil mencapai sasarannya. Tidak semua program kebijakan dilaksanakan dengan baik, sebab ada revitalisasi pasar yang ambruk setelah selesai dibangun dan menimbulkan korban jiwa, hal tersebut diduga karena bangunan yang tidak memenuhi standart kelayakan.

Strategi Pengembangan Pasar

Tradisional

Pasar tradisional merupakan basis ekonomi rakyat yang memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian nasional. Pasar tradisional merupakan sarana dalam rangka pemberdayaan masyarakat sehingga penyusunan strategi maupun pengembangan pasar tradisional merupakan hal yang sangat penting.

A. Prioritas Aspek Pengembangan Pasar Tradisional

Kebijakan pengembangan pasar tradisional disusun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah sehingga terjadi pemerataan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo. Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional sehingga aspek manajemen dalam hal pengelolaan pasar penting, dan untuk mengakomodir kepentingan seluruh pihak yang terkait maka aspek sosial juga penting. Terakhir, aspek teknis terkait dengan kondisi fisik pasar yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasar.

B. Prioritas Kriteria Pengembangan Pasar Tradisional

1. Aspek Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hal yang paling utama dalam pengembangan pasar tradisional adalah untuk menciptakan lapangan kerja.
2. Aspek Manajemen. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo maka penataan dan pembinaan PKL merupakan kriteria yang paling penting pada aspek manajemen.
3. Aspek Sosial. Pada pengembangan pasar tradisional yang dapat mendukung pertumbuhan pasar tradisional yaitu dengan menciptakan kondisi pasar yang aman, bersih dan nyaman sehingga konsumen lebih suka berbelanja di pasar tradisional dibandingkan di tempat lain.
4. Aspek Teknis. Supaya pedagang mau menempati kiosnya di pasar maka fasilitas pasar harus ditingkatkan sehingga pedagang betah berjualan di pasar tersebut. Bangunan fisik pasar juga harus diperbaiki supaya lebih bersih dan rapi sehingga dapat menarik orang untuk berbelanja di pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa *stakeholders* yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo, yaitu Bapeda, Disperindagkop, masyarakat pedagang, UPTD, pengelola swasta, Dispenda, DLHK dan DTKP, dengan kondisi sebagai berikut ;*Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan tertinggi adalah Bapeda dan Disperindagkop. Masyarakat pedagang dan UPTD memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. Dispenda, DLHK dan DTKP memiliki kepentingan yang rendah dan pengaruh yang tinggi. Pengelola pasar swasta memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh rendah.
2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional tidak mencapai keberhasilan yang disebabkan karena; Proses penyusunan dan perencanaan kebijakan yang kurang tepat sehingga menyebabkan implementasinya yang kurang tepat pula. Kriteria utama yang menyebabkan proses pembuatan kebijakan pengembangan pasar tradisional kurang tepat yaitu keterlibatan *stakeholders* dan proses penyusunan kebijakan pengembangan pasar tradisional yang benar. Kriteria utama yang menyebabkan penerapan kebijakan pengembangan pasar tradisional kurang tepat yaitu penerapan perencanaan pengembangan pasar tradisional secara efektif dan efisien.
3. Hasil analisis *stakeholders* menunjukkan bahwa tidak semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional dilibatkan dalam proses perencanaan dan penerapan kebijakan. Sehingga adanya kegagalan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional disebabkan karena tidak dilibatkannya seluruh *stakeholders* yang berkepentingan terhadap kebijakan ini.
4. Strategi pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa; Aspek yang paling penting dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional secara berurutan yaitu aspek ekonomi, aspek manajemen, aspek sosial dan aspek teknis. Kriteria-kriteria yang penting dalam aspek ekonomi secara berurutan yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan pedagang dan masyarakat dan meningkatkan

PAD. Kriteria-kriteria yang penting dalam aspek manajemen secara berurutan yaitu penataan dan pembinaan PKL, meningkatkan manajemen pengelolaan pasar tradisional secara profesional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membentuk pasar tradisional menjadi usaha yang efisien. Kriteria-kriteria yang penting secara berurutan dalam aspek sosial yaitu terciptanya kondisi pasar yang aman, nyaman dan bersih bagi konsumen, menciptakan pasar yang berdaya saing sehingga lebih kompetitif dan mengurangi potensi konflik dengan masyarakat. Kriteria-kriteria yang penting secara berurutan dalam aspek teknis yaitu peningkatan sarana dan prasarana pasar dan kondisi fisik pasar yang lebih bersih dan rapi.

5. Prioritas alternatif strategi dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Situbondo yaitu pemberdayaan pedagang dan pengelola pasar, pendistribusian PKL ke pasar-pasar yang telah dibangun, pembangunan pasar lingkungan, menjalin kemitraan dengan UKM dan koperasi, pemberian bantuan kredit dan pembentukan forum komunikasi.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan melibatkan seluruh *stakeholders* yang benar-benar memiliki kepentingan terhadap kebijakan.
2. Untuk meningkatkan kekuatan pengaruh dari masyarakat pedagang maka perlu dibentuk suatu asosiasi atau paguyuban pedagang untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.
3. Pemerintah seharusnya melaksanakan suatu studi kelayakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan sebelum menyusun suatu perencanaan kebijakan, sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdrabo, Mohamed A. dan Mahmoud A. Hassaan. *Stakeholder Analysis*. www.wadi-unifi.com. [30 Agustus 2007].
- DFID. 2006. *Manajemen Daur Proyek dan Penggunaan Kerangka Kerja Logis*. <http://www.deliveri.org> [30 Agustus 2007].
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah: Samodra Wibawa. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Dwijowijot, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ismawan, B. 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Istiningtiyas, A. Diyah. *Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Di Kota Bogor*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pertanian Dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Kartini, Rini. 2002. Dampak Perpindahan Lokasi Pasar Induk terhadap Sistem Pemasaran Sayur Mayur di Kota Bogor. *Skripsi*. Program Sarjana. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lamadlauw, Meidina Trijadi. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Agroindustri di Kabupaten Bogor. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mishra, Satish C. 2005. *Pembuatan Kebijakan Demokratis dalam Konteks yang Berubah*. United Nations Support Facility for Indonesian Recovery. Jakarta.
- Rahayu, Sri. 2005. Analisis Penentuan Lokasi Optimal Pasar Tradisional sebagai Pusat Perdagangan di Kota Bekasi dalam Pengembangan Wilayah. *Skripsi*. Program Sarjana. Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rangkuti, Khairunnisa. 2005. Analisis Pengembangan Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Wilayah (Studi Kasus Pasar Tradisional di Kota Medan). *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Universitas Sumatera Utara.
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Penerjemah: Liana Setiono. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Safitri, Benny. Analisis Respon Stakeholders terhadap Kebijakan Perluasan Kawasan di Taman Nasional Gunung Halimun – Salak (Studi Kasus Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Skripsi*. Program Sarjana. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Schmeer, Kammi. 2007. *Stakeholder Analysis at a Glance*. www.lachsr.org [7 Januari 2008].
- Tandiyar, Alan. 2002. Kajian Perkembangan Pasar Tanah Baru Sebagai Acuan Bagi Pembangunan Pasar Tradisional Baru di Kota Bogor. *Tesis*. Magister Teknik Pembangunan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Untoro, Fathoni. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) dalam Kerinci Seblat-Integrated Conservation and Development2001. No.49. *Salinan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar*..Situbondo: Kabupaten Situbondo. Dinas Pendapatan Daerah
-2007.No.112. *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Jakarta: Peraturan Presiden Republik Indonesia.

.....2008.No.53/M-DAG/PER/12. *Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Jakarta: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia